



Evaluasi Atas Pelayanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Kabupaten bintan (Studi Di SMP Negeri 2 Bintan)

¹⁾Diah Siti Utari, ²⁾Raja Abumanshur Matridi, ³⁾Neng Suryanti Nengsih, ⁴⁾ Siti Rumduni

^{1),2),3),5)} Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

⁴⁾ Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Email: Sitiromdoni9@gmail.com

Abstract

Since 2021, SMP Negeri 2 Bintan has accepted students with special needs, although SMP Negeri 2 Bintan has not yet become a school with inclusive education. With inclusive education, it is hoped that it will become a strategy to equalize opportunities to obtain good educational services. However, there are still many shortcomings that must be addressed in the service to realize inclusive education at SMP Negeri 2 Bintan.

The aim of this research is to evaluate educational services for children with special needs (ABK) in Bintan Regency (Study at SMP Negeri 2 Bintan). The type of research used in this research is qualitative exploratory. Based on the research results, it can be seen that in order to provide good educational services at SMP Negeri 2 Bintan, there is still a lot that needs to be improved, starting from the acceptance of new students, the socio-economic conditions of parents of students with special needs, administrative requirements for inclusive teachers, facilities and infrastructure, program financing, competency of inclusive teachers, school exam results, social attitudes and evaluation of inclusive education outcomes and those that have approached optimal educational services, namely the inclusive education curriculum, teachers' interest in teaching in inclusive classes, and the learning process in inclusive classes. In conclusion, in efforts to accept students with special needs and pay attention to inclusive education, there are still many aspects that need to be improved and improved.

Keywords: *Inclusive education, special needs children's services*

Abstrak

SMP Negeri 2 Bintan belum menjadi sekolah dengan pendidikan inklusi, namun sejak tahun 2021, SMP Negeri 2 Bintan telah menerima siswa berkebutuhan khusus. Dengan adanya pendidikan inklusi diharapkan menjadi salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Namun, masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi dalam pelayanannya untuk mewujudkan pendidikan inklusi di SMP Negeri 2 Bintan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kabupaten Bintan (Studi Di SMP Negeri 2 Bintan). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui untuk dapat menjadi pelayanan pendidikan yang baik di SMP Negeri 2 Bintan ini masih banyak yang harus dibenahi dari mulai penerimaan siswa baru, kondisi sosial ekonomi orang tua siswa berkebutuhan khusus, persyaratan administrasi guru inklusi, sarana dan

prasarana, pembiayaan program, kompetensi guru inklusi, hasil ujian sekolah, sikap sosial dan evaluasi luaran pendidikan inklusi dan yang telah mendekati optimal layanan pendidikan yaitu kurikulum pendidikan inklusi, minat guru mengajar di kelas inklusi, dan proses pembelajaran di kelas inklusi. Kesimpulannya, upaya untuk menerima siswa berkebutuhan khusus dan memberikan perhatian pada pendidikan inklusi, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Katakunci: Pendidikan Inklusi, Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus



PENDAHULUAN

Anak merupakan orang-orang yang berada dalam tahap perkembangan awal kehidupan mereka setelah lahir hingga mencapai usia tertentu, yang juga dikenal sebagai masa kanak-kanak. Potret penduduk di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 terdapat 79.486.424 anak yang sebesar 29,15 persen dari jumlah penduduk total. Anak memiliki potensi untuk dikembangkan serta dapat berkontribusi dalam mempercepat pembangunan. Saat ini, ada 22,97 juta anak penyandang disabilitas di Indonesia, atau sekitar 8,5 % dari populasi, dengan 646 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Bintan.

Terkait layanan pendidikan inklusi juga merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) termasuk di dalamnya adalah peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik atau mental dan memiliki keistimewaan dalam kecerdasan atau bakat. Pendidikan untuk semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan suatu keharusan inklusi bagi mereka yang memiliki keterbatasan, dan sebagai langkah menuju keadilan sosial bagi semua individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dalam penelitian Nisrina Qurrotul Aini (2024), Manajemen sekolah inklusi menjadi suatu komponen yang penting untuk dilaksanakan secara optimal, namun dalam pelaksanaannya manajemen sekolah inklusi masih memiliki berbagai permasalahan seperti kesulitan mencari sumber daya manusia sebagai guru pendamping khusus dengan lulusan sarjana pendidikan luar biasa, setting kelas yang digunakan dalam sekolah inklusi hanya mencakup kelas reguler dengan pull out. Sehingga perlu melakukan pengelolaan dari awal perencanaan, pengorganisasian, pelatihan, kerjasama, hingga pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini. Disamping itu, komunikasi juga memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan inklusi ini. Untuk membentuk karakter siswa dibutuhkan pengenalan aqidah islam, terutama anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pedoman hidup di masa depan. Dalam penelitiannya, Nurul Faridha (2022) mengatakan bahwa dalam komunikasi interpersonal perlu memperhatikan tahapan-tahapan, agar komunikasinya menjadi efektif, diantaranya yaitu: tahap orientasi, tahap pertukaran peninjauan afektif, tahap pertukaran afektif, dan tahap pertukaran stabil. Sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan baik dengan siswa lain dan dengan gurunya.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pelayanan yang diberikan oleh SMPN 02 Kabupaten Bintan, yang belum menjadi sekolah dengan Pendidikan



Inklusi, namun sudah melaksanakan pendidikan inklusi tersebut. Bagaimana sekolah ini mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada siswa-siswi berkebutuhan khusus ditengah-tengah siswa normal lainnya. Di Kabupaten Bintan terdapat beberapa sekolah negeri yang menerima siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) yaitu dengan data sebagai berikut :

TabelI.1
Jumlah Siswa Disabilitas SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bintan
Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Jenjang	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
				Lk	Pr	
1	SDN 001 Gunung Kijang	SD	Gunung Kijang	2	-	2
2	SDN 001 Toapaya	SD	Toapaya	1	-	1
3	SDN 001 Mantang	SD	Mantang	1	-	1
4	SDN 002 Gunung Kijang	SD	Gunung Kijang	1	1	2
5	SDN002Teluk Sebong	SD	Teluk Sebong	2	-	2
6	SDN005 Seri Kuala Lobam	SD	SeriKuala Lobam	1	-	1
7	SDN007 Bintan Timur	SD	Bintan Timur	2	-	2
8	SDN007 Seri Kuala Lobam	SD	Seri Kuala Lobam	1	-	1
9	SDN008 Binut	SD	Bintan Utara	1	2	3
10	SDN010 Bintan Timur	SD	Bintan Timur	2	1	3
11	SDN011 Teluk Bintan	SD	Teluk Bintan	1	1	2



12	SDIT Bahtera Insani	SD	Bintan Utara	2	-	2
13	SD Gracia	SD	Seri Kuala Lobam	1	-	1
14	SDIT An Nahl	SD	Seri Kuala Lobam	1	1	2
15	SMPN16 Bintan	SMP	Seri Kuala Lobam	1	-	1
16	SMPN 2 Bintan	SMP	Bintan Timur	2	2	4
17	SMPN 21 Satu Atap Teluk Bintan	SMP	Teluk Bintan	-	1	1
18	MTs Berakit	MTs	Teluk Sebong	-	1	1
	TOTAL			22	10	32

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan oleh Bappelitbang
Bintan Juni 2023*

Dari data tersebut terlihat masih cukup banyak ABK yang bersekolah di sekolah negeri adalah SMP Negeri 2 Bintan khususnya di Kecamatan Bintan Timur.

Dengan adanya pendidikan inklusi diharapkan menjadi salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusi dapat menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan Inklusi juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusi menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak, dan menghargai perbedaan serta di sesuaikan dengan proses pembelajaran dengan anak umum lainnya yang bersekolah di sekolah negeri.

Sekolah dengan penyelenggara pendidikan inklusi harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, antara lain keberadaan siswa berkebutuhan khusus, konsisten terhadap pendidikan inklusi, manajemen sekolah, sarana dan prasarana serta ketenagaan. Sejak tahun 2021, SMP Negeri 2 Bintan telah menerima siswa berkebutuhan khusus, walaupun SMP Negeri 2 Bintan ini belum menjadi sekolah dengan pendidikan inklusi, tetapi masyarakat sekitar yang memiliki anak berkebutuhan khusus tetap



menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Berdasarkan wawancara awal juga, ternyata orang tua siswa ABK menyekolahkan anaknya ke SMP negeri bukan di SLB karena salah satu alasannya terkendala letak geografis SLB yang jauh, hal ini juga yang mengakibatkan masih banyaknya siswa ABK yang bersekolah di sekolah umum khususnya di SMP Negeri 2 Bintan. Selain itu dari hasil observasi awal, terlihat beberapa siswa ABK kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, dan guru yang mengajar di kelas tersebut juga mengalami kesulitan untuk menghadapi siswa dengan beragam variasi kebutuhan khusus nya bersama dengan siswa lainnya, terdapat juga siswa ABK yang kesulitan berjalan, namun disekolah tidak terdapat fasilitas khusus untuk membantu memudahkannya berjalan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting, melalui penelitian ini akan direkomendasikan beberapa hal kepada stakeholder terkait pelayanan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 2 Kabupaten Bintan, agar siswa tersebut bisa mendapatkan haknya atas pendidikan yang baik, yang seharusnya mereka dapatkan bersama dengan siswa normal lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelayanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Kabupaten bintan (Studi Di SMP Negeri 2 Bintan)

KAJIAN PUSTAKA

1. Administasi Publik

Pada dasarnya, administrasi public bukanlah ide baru di Indonesia, administrasi sudah ada sejak lama. Tetapi, para ahli menggunakan istilah administrasi publik sebagai pengganti administrasi negara. Menurut Panjaitan dan Pardede, (2021:1) menjelaskan bahwa administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi publik juga merupakan bidang yang mempelajari tata kelola dan manajemen organisasi publik, termasuk pemerintah, lembaga negara, dan entitas publik lainnya. kebijakan dan program publik adalah bagian dari administrasi publik. Administrasi publik memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran sosial melalui pengelolaan sumber daya publik yang efisien dan efektif.

2. Evaluasi



Menurut Nugroho (2018:779) mendefenisikan evaluasi sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi, evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan dua pengertian “selesai”, yaitu: (1) waktu mencapai/melewati “tenggat waktu” dan (2) pengertian kerja “pekerjaan tuntas”. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep evaluasi yang dijabarkan yaitu menurut Yuwono, (2017:51-188), yaitu: evaluasi masukan (*input*), Proses (*Process*), Produk (*Product*), dan Luaran (*Outcomes*).

3. Pelayanan Pendidikan

Menurut Kamaruddin, Jamaluddin, dan Ahmad (2019:18) Pelayanan adalah serangkaian kegiatan karena itu merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Pelayanan juga berhubungan tindakan atau proses yang memberikan bantuan, dukungan, atau manfaat kepada orang lain atau pelanggan dalam berbagai situasi.

Selanjutnya terkait pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Negeri 2 Bintan yaitu upaya untuk memastikan bahwa ada anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus, baik karena cacat fisik, mental, atau belajar, memiliki akses, dukungan, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelayanan pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa ABK memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang seperti anak-anak lainnya, serta untuk membantu mereka mencapai potensi mereka secara maksimal.

4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Menurut Setyaningsih *et al.*, (2022:3) Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Untuk itu, ABK memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang



dialami oleh masing- masing anak.

5. Pendidikan Inklusi

Menurut Arriani *et al.*, (2021:3) Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Pendidikan inklusi berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, dan kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak penyandang cacat dan berbakat, anak dari kelompok etnis minoritas, bahasa atau budaya dan anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung. Penyelenggaraan pendidikan inklusi berarti menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain dan berinteraksi dengan semua anak. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki program belajar secara individu yang memungkinkan dia mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis eksploratif kualitatif. Metode penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk meningkatkan pemahaman makna, konteks, dan subjektif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Bintan, Kabupaten Bintan, dalam hal ini di dasari oleh observasi yang mana lokasi tersebut sebagai sumber fenomena sosial mengenai penelitian ini yaitu mengenai pelayanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Negeri 2 Bintan. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, komite sekolah, kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), pengawas SMP Negeri Bintan dan orang tua siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 2 Bintan. Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data difokuskan pada 3 teknik. Beberapa teknik yang digunakan peneliti yaitu



Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Teknik Analisa Data dalam penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data, yang terdiri dari tahapan kondensasi data, penyampaian data, dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMP Negeri 2 Bintan ini belum disahkan karena walaupun sudah menerima siswa ABK untuk belajar di sekolah tersebut tetapi masih belum diresmikan menjadi pendidikan inklusi karena masih terdapat beberapa prosedur yang belum dilengkapi salah satunya yaitu belum memiliki guru dengan kompetensi khusus untuk menangani siswa ABK. Dalam ruang lingkup pendidikan inklusi para guru juga memiliki peranan penting untuk dapat mendidik ABK. Sekolah inklusi ini juga merupakan layanan pendidikan yang mempersyaratkan siswa berkebutuhan khusus dilayani sesuai kemampuannya. Dengan adanya pelayanan pendidikan yang sesuai dengan indikator pendidikan inklusi tentunya berdampak baik bagi seluruh siswa khususnya ABK, dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis evaluasi atas pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kabupaten Bintan (Studi di SMP Negeri 2 Bintan) dengan menggunakan indikator yang telah dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Masukan (Input) Pendidikan Inklusi

a) Rekrutmen/Seleksi siswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan bahwa SMP Negeri 2 Bintan ini merupakan sekolah penggerak artinya dalam pengembangan dan proses hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul, serta menerapkan suatu kurikulum yang mengacu kepada aspek dalam kehidupan masyarakat, untuk itu sekolah ini belum ditunjuk menjadi sekolah inklusi hanya di tunjuk sebagai sekolah penggerak. Untuk proses pembelajaran siswa ABK yang berdominan siswa *slow learner* dan juga dari ketidakcocokandengan metode pembelajaran, lingkungan rumah tidak kondusif, keterlibatan Guru BK hanya sebatas untuk



mengasesmen saja bukan untuk mengintervensi dan saat ini juga pihak SMP Negeri 2 Bintan belum ada bekerja sama dengan pihak psikologi khusus untuk membimbing ABK. Untuk penerimaan siswa baru ada salah satu orang tua siswa ABK yang meminta bantu kepada pihak sekolah untuk dapat didaftarkan anaknya di SMP Negeri 2 Bintan selain karena rumahnya dekat dengan sekolah juga karena pihak sekolah menganggap sekolah tersebut bisa membimbing siswa ABK. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yaitu kurangnya koordinasi antar pihak Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 2 Bintan antara lain mengenai Guru BK, di SMP Negeri 2 Bintan sejak 2 tahun lalu sudah ada Guru BK, namun pihak Dinas tidak mengetahui hal tersebut, serta di Dinas Pendidikan masih belum ada pengawasan untuk tiap sekolah khususnya SMP di Kabupaten Bintan.

b. Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa berkebutuhan khusus disekolah reguler.

Indikator kondisi sosial ekonomi orang tua siswa berkebutuhan khusus dilihat dari ketersediaan tabulasi data terkait kondisi sosial ekonomi keluarga siswa berkebutuhan khusus yang masuk di SMP Negeri 2 Bintan. Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan ada siswa ABK yang tidak mau lagi mengikuti pelajaran dan tidak mau sekolah lagi dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang mana anak tersebut tinggal bersama neneknya tanpa kedua orang tua yang membimbingnya, dan hanya bermata pencarian sebagai nelayan, kebanyakan orang tua siswa ABK bekerja sebagai nelayan dan bersih-bersih rumah. Untuk pihak Komite Sekolah tidak ada program khusus yang dikhususkan untuk siswa ABK dan terkait jarak tempuh orang tua siswa ke sekolah ABK, untuk menyekolahkan anak-anak ABK tersebut orangtua tidak mampu mengantar jemput dari Kijang ke Tanjung Uban karena satu-satunya SLB Negeri di Kabupaten Bintan hanya ada di Uban.



c. Persyaratan administrative guru inklusi.

Berdasarkan temuan dan analisis yang peneliti kumpulkan dari lapangan masih belum ada guru pembimbing khusus untuk membimbing siswa ABK yang telah memenuhi syarat inklusi, belum ada guru khusus ABK yang ada hanya Guru BK umum yang membimbing siswa di SMP Negeri 2 Bintan dan dalam belajar juga masih adabeberapa siswaABK yangkurangberminat dengan pembelajaran di kelas, seperti mata pelajaran matematika, dan IPA.

d. Kurikulum pendidikan inklusi.

Berdasarkan temuan dan analisis terkait pendidikan inklusi di SMP Negeri 2Bintan yaitu selama ini tidak ada modifikasi kurikulum untuk ABK hanya disesuaikan dengan kemampuan siswanya saja, para guru masih kebingungan dalam membimbing dan mengajar siswa berkebutuhan khusus yang berada di kelas 9 apalagi masih menggunakan Kurikulum 2013, untuk penerapan kurikulum pihak komite sekolah tidak dilibatkan, pihak Dinas Pendidikan masih merencanakan pelatihan untuk guru pembimbing khusus siswa ABK yang direncanakan pada tahun 2025 nanti, selama ini belum ada pelatihan tersebut karena keterbatasan anggaran.

e. Sarana dan prasarana belajar pendidikan inklusi.

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan yaitu di SMP Negeri 2 Bintan tidak adanya sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk siswa ABK, untuk guru pembimbing siswa ABK hanya ada Guru BK umum pihak sekolah mengharapkan adanya guru khusus untuk dapat membimbing siswa ABK, pihak Komite Sekolah SMP Negeri 2 Bintan belum ada melakukan pemantauan serta pengawasan yaitu kriteria fasilitas sekolah, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, biaya sarana dan prasarana khusus untuk ABK tidak bisa diambil dari dana BOS karena tidak cukup untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk



siswa ABK, akan di bentuk unit layanan disabilitas (ULD) bekerja sama dengan DP3KB yang bertujuan untuk membimbing semua siswa ABK yang ada di Kabupaten Bintan.

f. Pembiayaan program.

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan pembiayaan program khusus untuk siswa ABK tidak ada, adanya biaya dalam proses pembelajaran dan sumbernya dari dana BOS itu hanya untuk membiayai operasional sekolah, seperti biaya alat tulis, biaya buku, biaya perawatan sekolah, biaya listrik, air dan lainnya, program pendidikan inklusi juga masih tidak ada, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan anggaran untuk program siswa ABK belum ada dan program untuk siswa ABK biasanya dilakukan oleh pihak sekolah.

2. Proses (*Process*) Pendidikan Inklusi

a. Kompetensi guru inklusi.

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan yaitu untuk guru yang terqualifikasi khusus untuk membimbing siswa ABK sejauh ini masih belum ada, pelatihan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan belum ada juga, sebab dari SMP Negeri 2 Bintan ini belum menjadi sekolah inklusi karena belum ada guru khusus yang terqualifikasi membimbing dan menangani siswa ABK, dan kerjasama antara pihak SMP Negeri 2 Bintan dan SLB juga belum ada.

b. Minat guru mengajar di kelas inklusi.

Berdasarkan analisis dan temuan di lapangan yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bintan tidak ikut serta dalam proses belajar mengajar hanya mengambil tanggung jawab mengawasi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.

c. Proses pembelajaran di kelas inklusi.

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti di lapangan yaitu kendala dalam proses pembelajaran adalah siswa ABK tidak paham dengan materi yang diajarkan, dan kendala ini diungkapkan ketika ada rapat bulanan seluruh guru, dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu boleh menggunakan hp, ketika sudah tidak ada mata



pelajaran itu, hp wajib untuk dikumpulkan ke guru tersebut, tetapi pada kenyataannya peneliti melihat langsung bahwa ada salah satu siswa yang didapati memainkan hp dikelas padahal harusnya hp tersebut dikumpulkan, dan penilaiannya juga disesuaikan tergantung perilaku siswa ABK tersebut, Guru BK ternyata tidak fokus hanyamenjadi guru bimbingan konseling saja, tetapi juga menjadi guru mengajar di kelas, dan pihak Komite Sekolah tidak ada dijelaskan terkait program pendidikan inklusi dan pihak komite tidak dilibatkan terkait program pendidikan inklusi tersebut.

3. Produk (*Product*) Pendidikan Inklusi

a. Hasil Ujian Nasional.

Berdasarkan temuan dan analisis di lapangan oleh peneliti yaitu hasil ujiannasional atau sekarang menjadi ujian sekolah disesuaikan dengan siswa ABK, guru akan memberikan nilai yang bagus apabila dalam bersikap anak ABK itu baik, sopan, dan tidak nakal, karena pernah ada siswa ABK yang nakal dengan temannya, tidak sopan dengan gurunya, dan tidak mau masuk sekolah lagi, hal itu disebabkan karena kebiasaan di rumah, hal tersebut yang kemungkinan besar akan membuat siswa tidak naik kelas, dalam soal ujian tidak ada perbedaan soal-soalnya, semuanya sama disesuaikan dengan tingkat kelasnya, dan juga dari pihak Dinas Pendidikan agak sedikit keberatan kepada perintah penunjukan pendidikan inklusi, seharusnya siswa ABK bersekolah di SLB, tapi karena ada kendala tadi jadi harus sekolah di sekolah umum dengan fasilitas yang kurang memadai dan anggaran pun terbatas.

b. Sikap sosial.

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti di lapangan sikap sosial di kelas antara siswa normal dan siswa ABK tidak saling bermain bersama-sama, saat istirahat siswa normal bermain secara berkelompok akhirnya siswa ABK ini bermain dengan teman lain yang sama kondisinya di kelas 8, dari pihak Komite Sekolah menjelaskan bahwa sampai sekarang belum ada pertemuan antara pihak guru-guru SMP Negeri 2, orang tua



siswa ABK dan Komite Sekolah sendiri terkait membahas masalah pendidikan inklusi ini, dan ada kasus dari pihak Dinas Pendidikan yang mana orang tua siswa ABK tidak mengakui bahwa anaknya termasuk salah satu siswa ABK.

4.Luaran (*Outcome*) Pendidikan Inklusi

a.Evaluasi luaran pendidikan inklusi.

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti di lapangan yaitu SMP Negeri 2 Bintan belum ditunjuk oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sebagai sekolah inklusi karena memang belum ada guru yang dapat membimbing siswa berkebutuhan khusus, alasan menerima siswa ABK di SMP Negeri 2 Bintan ini karena guru-guru di sekolah merasa anak ABK tersebut masih bisa dibimbing oleh guru-guru tersebut, harus diadakan pembekalan terkait pendidikan berkarakter, karena anak SMP sekarang etika dan moralnya tidak baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Bintan masih belum maksimal, SMPN 2 Bintan masih harus membenahi beberapa hal untuk bisa menjadi penyelenggara pendidikan inklusi di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus yaitu masih belum terdapat pembentukan tim atau panitia khusus seleksi siswa ABK, belum melibatkan tim ahli seperti psikolog maupun dokter, dan orang tua siswa ABK bahwa orang tua siswa mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi karena dekat dengan rumah, padahal khusus untuk siswa ABK harusnya menggunakan jalur afirmasi bukannya jalur zonasi. Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa berkebutuhan khusus juga turut mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusi ini, dimana siswa ABK tidak mau lagi mengikuti pelajaran dan tidak mau sekolah lagi dikarenakan tinggal bersama neneknya tanpa kedua orang tua yang membimbingnya, dan hanya bermata pencarian sebagai nelayan, kebanyakan orang tua siswa ABK bekerja sebagai nelayan dan bersih-



bersih rumah. Persyaratan administratif guru inklusi yaitu Di SMP Negeri 2 Bintan masih belum ada guru pembimbing khusus untuk ABK.

Kurikulum pendidikan inklusi yaitu masih ada beberapa hambatan dan kekurangan seperti materi yang tidak sesuai dengan peserta didik dan ada media yang belum lengkap sehingga guru sulit untuk memberikan materi tersebut kepada peserta didik. Belum terdapat sarana dan prasarana khusus untuk ABK. Masih belum adanya pembiayaan program pendidikan inklusi. Hasil penilaian yang dilakukan oleh guru subjektif sehingga menyebabkan tidak akurat dalam memberikan hasil penilaian ujian menjadi tidak akurat. Sikap sosial yaitu masih ada siswa biasa dan siswa ABK di kelas 9 tidak saling bermain bersama-sama, saat istirahat siswa normal bermain secara berkelompok akhirnya siswa ABK ini bermain dengan teman lain.

Saran

Untuk menunjang agar pelayanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mewujudkan pendidikan inklusi di SMP Negeri 2 Bintan ini menjadi lebih baik, diharapkan agar pemerintah dapat melihat bagaimana kondisi pelayanan pendidikan untuk siswa ABK yang ada di SMP Negeri 2 Bintan. Berikut merupakan saran-saran untuk dapat mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada ABK dalam mewujudkan pendidikan inklusi di SMP Negeri 2 Bintan, adalah sebaiknya pihak SMPN 2 Bintan dan Stakeholder terkait lainnya agar melihat dan mengevaluasi terlebih dahulu kesiapan dari sekolah tersebut sebelum menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi siswa Berkebutuhan Khusus disekolahnya, baik secara administrative, maupun teknis pelaksanaannya, serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan belajar mengajar siswa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K.N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan penerbit Muhammad Zaini.
- Abdus samad,Z.(2021).*Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Aini, N. Q. *penerapan manajemen sekolah inklusi di tk sekolah alam kebun tumbuh* (Bachelor's thesis).



- Arriani, F., Agustiawan, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Tulalessy, C., & Herawati, F. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Fauzy, A.(2019). *MetodeSampling*.Universitas Terbuka.
- Fiantika,F.R.,Wasil,M.,Jumiyati,S.,Honesti,L.,Mouw,E.,Jonata,&Mashudi,I.(202 2). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Florida, N. F. *Komunikasi Interpersonal Guru dan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 001 Tanjungpinang Sebagai Sarana Memperkenalkan Aqidah Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Harsono, J., Dewi,D.S.K.,&Desriyanti.(2021). *Pelayanan Sektor Publik*. Unmuh Ponorogo Press.
- Heryana, A.(2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif* (p.4). Universitas Esa Unggul.
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance. *Hospitality*, 11, 3.
- Mudjiyanto, B.(2018).TipePenelitianEksploratif Komunikasi. *Studi Kasus Komunikasi Dan Media*, 22, 65–74.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., & Bano, V. O. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Panjaitan,D.T.M.R.,&Pardede,P.D.K.(2021).*AdministrasiPublik*.EurekaMedia Aksara.
- Pantih,S.(2023).*Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik*. Eureka Media Aksara.
- Sahir,S.H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Setyaningsih, R.,Nurhidayah, N.,Mariza, A., & Hastuti, L.S. (2022). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Tahta Media.
- Yuwono, I. (2017). *Indikator Pendidikan Inklusif*. Zifatama Jawara.
- Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 TentangSistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat istimewa, Pasal1,2, 610,dan 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, yang terdapat dalam Pasal 3, dan 10 ayat 1



Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi Pasal 6a b, 7, 15 dan 23

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 4, 14

Direktorat Standardisasi Produk Pangan Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2013. Tentang Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang Orang Tua, Guru dan Pengelola Kantin

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pasal 1, dan 11.

